E-ISSN : 3088-9928

https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/

Masa Depan Indonesia di Persimpangan Geopolitik dan Ekonomi: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Devi Ernantika, M.E.

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun

deviernantika@stainumadiun.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas posisi strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan disrupsi ekonomi global, serta menyoroti peran penting Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membekali generasi muda menghadapi tantangan tersebut. Melalui pendekatan analisis kualitatif-deskriptif, penulis menguraikan kompleksitas rivalitas kekuatan global, tantangan keamanan maritim, transformasi ekonomi berbasis teknologi dan energi terbarukan, hingga urgensi pembaruan kurikulum PKn. Artikel ini menekankan bahwa Indonesia harus mengadopsi strategi politik bebas aktif dan ekonomi adaptif guna menjaga kedaulatan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Di sisi lain, PKn perlu direvitalisasi agar mampu menanamkan kesadaran geopolitik, kemampuan berpikir kritis, serta nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda sebagai agen perubahan. Dengan demikian, pendidikan menjadi pilar penting dalam menjaga masa depan Indonesia di tengah persimpangan global.

Kata kunci: geopolitik, ekonomi global, Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, strategi nasional

Pendahuluan

Dunia saat ini bergerak dalam kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditandai oleh dinamika geopolitik yang bergejolak dan lanskap ekonomi yang terus mengalami disrupsi. Dalam pusaran perubahan global ini, Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di persimpangan dua benua dan dua samudra, memegang posisi yang sangat strategis. Letak geografis ini secara inheren memberikan Indonesia peran penting dalam dinamika politik, ekonomi, dan keamanan baik di kawasan Asia Tenggara maupun dalam sistem global secara keseluruhan. Namun, posisi strategis ini juga membawa tantangan signifikan, mulai dari sengketa teritorial dan tekanan dari kekuatan global, hingga isu ketidaksetaraan ekonomi dan lingkungan.

Pentingnya pembahasan ini semakin relevan mengingat bahwa kepentingan maritim negara kepulauan seperti Indonesia harus menjadi prioritas, karena dinamika geopolitik di wilayah maritim memiliki konsekuensi besar bagi kepentingan masa depan bangsa. Artikel ini akan menganalisis bagaimana Indonesia dapat memperkuat posisinya dan mengoptimalkan peluang di tengah kompleksitas ini. Di tengah kondisi ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) muncul sebagai elemen krusial diperlukan sebagai wadah dan sarana pembinaan warga negara yang bermakna, yang berfungsi untuk membentuk generasi muda berkarakter dan memiliki kesadaran kritis terhadap isu-isu nasional dan internasional. Generasi muda, sebagai "agent of change", perlu dibekali untuk berpikir kritis mengenai isu-isu tersebut agar dapat membawa perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.)

Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan literatur dari berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, serta laporan terkini mengenai isu geopolitik, ekonomi global, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi keterkaitan antara posisi strategis Indonesia, tantangan global, dan peran pendidikan dalam membentuk warga negara yang tangguh dan adaptif. Penulis menggunakan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kerangka interpretatif untuk melihat bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana strategis dalam merespons perubahan global yang kompleks dan multidimensi.

PEMBAHASAN

A. Dinamika Geopolitik Global dan Posisi Strategis Indonesia

1. Lanskap Geopolitik Kontemporer: Pusaran Kekuatan dan Ancaman Multidimensional

Lanskap geopolitik global saat ini ditandai oleh kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana persaingan kekuatan besar, konflik regional yang persisten, dan dinamika multilateralisme saling berinteraksi membentuk tatanan dunia yang baru. Salah satu fitur paling menonjol adalah intensifikasi persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Rivalitas ini bukan sekadar perebutan hegemoni ekonomi; ia merambah ke berbagai domain, termasuk militer (dengan peningkatan anggaran pertahanan dan modernisasi senjata yang memicu perlombaan senjata regional), teknologi (perebutan dominasi dalam kecerdasan buatan, 5G, semikonduktor, dan cybersecurity), serta ideologi (model demokrasi Barat vs. model otoritarianisme Tiongkok). Ketegangan ini memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas regional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, yang telah menjadi pusat gravitasi strategis global, menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar dunia. Kawasan ini, membentang dari Samudra Hindia hingga Pasifik Barat, menjadi arena utama bagi proyeksi kekuatan, latihan militer bersama, dan pembentukan aliansi strategis.

Di samping persaingan kekuatan besar, konflik dan ketegangan regional di berbagai titik di dunia terus memperkeruh suasana global. Contohnya adalah sengketa yang belum terselesaikan di Laut Cina Selatan, yang melibatkan klaim tumpang tindih antara beberapa negara ASEAN dan Tiongkok; situasi Semenanjung Korea yang tegang dengan ancaman nuklir; serta konflik di Timur

Tengah yang terus-menerus mengancam stabilitas pasokan energi global dan memicu gelombang migrasi. Setiap eskalasi di titik-titik konflik ini berpotensi mengganggu jalur perdagangan vital, memicu krisis kemanusiaan dan pengungsi, serta bahkan menarik keterlibatan kekuatan eksternal, sehingga mengancam stabilitas regional dan global secara keseluruhan. Ancaman non-tradisional seperti terorisme transnasional, kejahatan siber, dan pandemi global juga menambah kompleksitas lanskap keamanan, menuntut kerja sama lintas batas yang lebih erat.

Meskipun diwarnai rivalitas, multilateralisme dan regionalisme juga menunjukkan peran krusial sebagai mekanisme untuk mengelola konflik dan mempromosikan kerja sama. Organisasi regional seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) berupaya keras mempertahankan sentralitasnya sebagai forum dialog dan kerja sama di kawasan. Melalui prinsip "konsensus" dan "non-intervensi", ASEAN berupaya membangun norma-norma regional yang mendorong perdamaian dan stabilitas, meskipun kerap menghadapi kritik atas lambatnya pengambilan keputusan dalam isu-isu sensitif. Forum-forum internasional lainnya, seperti G20 dan PBB, juga menjadi platform bagi negara-negara untuk membahas isu-isu global yang melintasi batas negara, seperti perubahan iklim, pandemi, dan krisis ekonomi.

Namun, di tengah pergeseran kekuatan dan tren unilateralism, konsep multilateralisme tradisional menghadapi tantangan, dengan munculnya blok-blok kepentingan yang lebih kecil (misalnya AUKUS atau QUAD) dan kecenderungan proteksionisme di beberapa negara besar yang mengikis semangat kerja sama global.

2. Geopolitik Indonesia: Menjaga Keseimbangan dan Kepentingan Nasional di Poros Maritim Dunia

Dalam lanskap geopolitik global yang fluktuatif dan penuh tekanan ini, Indonesia menavigasi posisinya dengan berpegang teguh pada prinsip politik bebas aktif. Prinsip ini, yang telah menjadi pondasi diplomasi Indonesia sejak kemerdekaan, memungkinkan Indonesia untuk tidak memihak pada blok kekuatan mana pun, melainkan secara aktif terlibat dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, mempromosikan kerja sama, dan memajukan kepentingan nasionalnya.

Relevansi prinsip ini di era modern semakin terasa, di mana Indonesia dituntut untuk menjadi aktor yang mandiri dan konstruktif di tengah persaingan antara kekuatan besar. Politik bebas aktif memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara, baik Barat maupun Timur, tanpa terikat pada aliansi militer atau ideologis tertentu, sehingga mampu menjaga kemandirian dalam perumusan kebijakan luar negeri dan menghindari jebakan polarisasi. Ini memungkinkan Indonesia untuk mengambil posisi sebagai penengah atau fasilitator dalam konflik regional dan global, memperkuat kredibilitasnya sebagai pemain global yang bertanggung jawab.

Posisi geografis Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik menempatkannya sebagai jembatan strategis sekaligus potensi medan konflik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua samudra utama, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dua benua, Asia dan Australia, Indonesia memegang peran sentral dalam dinamika geopolitik global. Posisi geografis ini, yang mencakup jalur-jalur pelayaran internasional krusial atau choke points seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, memberikan pengaruh signifikan terhadap keamanan dan perdagangan maritim global. Lebih lanjut, teori-teori geopolitik klasik, seperti teori Heartland oleh Sir Halford Mackinder yang menekankan pentingnya dominasi atas daratan Eurasia sebagai kunci kekuatan global, serta teori Sea Power oleh Alfred Thayer Mahan yang menggarisbawahi pentingnya kekuatan maritim, angkatan laut yang kuat, dan kendali atas jalur laut, sangat relevan untuk konteks Indonesia. Bagi Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, penguasaan dan pengamanan jalur maritim bukan hanya soal kedaulatan wilayah dan kekayaan sumber daya laut, tetapi juga vital bagi keberlanjutan ekonomi, keamanan energi, dan pertahanan nasional. Visi Poros Maritim Dunia yang diusung Indonesia merupakan manifestasi dari kesadaran akan potensi dan tantangan geopolitik maritim ini, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani dan mampu menghubungkan dunia.

Namun, posisi strategis ini juga membawa tantangan signifikan terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Isu-isu seperti sengketa di Laut Cina Selatan,

terutama klaim Tiongkok yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna, menjadi perhatian serius yang menuntut ketegasan diplomasi dan kesiapan pertahanan maritim. Ancaman non-tradisional semakin kompleks, meliputi terorisme lintas batas, kejahatan transnasional (seperti penangkapan ikan ilegal yang merugikan triliunan rupiah, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia), serta potensi bencana alam yang dapat mengganggu stabilitas regional.

3. Implikasi Geopolitik terhadap Pembangunan Nasional Indonesia: Antara Peluang dan Kerentanan

Dinamika geopolitik global memiliki implikasi langsung dan tidak langsung terhadap seluruh aspek pembangunan nasional Indonesia. Pertama, hal ini secara fundamental memengaruhi investasi dan kerja sama ekonomi. Rivalitas antara kekuatan besar dapat memunculkan tekanan bagi Indonesia untuk memilih mitra dagang atau investasi, berpotensi membatasi pilihan atau bahkan memicu sanksi. Namun, di sisi lain, jika Indonesia mampu menjaga netralitas dan menciptakan iklim investasi yang stabil dan prediktif, ini membuka peluang untuk menarik investasi dari berbagai sumber global, mendiversifikasi pasar ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada satu negara atau blok

Kedua, ancaman terhadap keamanan energi dan pangan menjadi semakin nyata dalam konteks geopolitik yang bergejolak. Gangguan pada jalur pelayaran internasional, terutama di Selat Malaka atau Laut Cina Selatan, yang merupakan rute penting bagi impor minyak dan gas Indonesia, dapat berdampak langsung pada pasokan dan harga komoditas vital ini. Ketergantungan pada impor energi dan pangan dari negara-negara yang rentan konflik geopolitik dapat membahayakan ketahanan nasional. Oleh karena itu, kebijakan untuk mendiversifikasi sumber energi dan pangan, memperkuat produksi domestik melalui modernisasi pertanian, dan membangun cadangan strategis menjadi imperatif untuk mengurangi kerentanan.

Ketiga, geopolitik turut membentuk diplomasi dan citra global Indonesia. Peran aktif Indonesia dalam forum multilateral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan G20, serta kepemimpinannya di ASEAN melalui inisiatif seperti

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), sangat krusial untuk memproyeksikan pengaruhnya di kancah global dan memastikan kepentingannya terakomodasi dalam pembentukan norma dan tata kelola global. Partisipasinya dalam misi perdamaian, inisiatif diplomatik untuk penyelesaian konflik regional (misalnya di Myanmar), dan kemampuannya untuk bernegosiasi di tengah kepentingan yang berbeda, akan memperkuat posisi tawar dan citra positifnya di mata dunia sebagai negara yang damai dan konstruktif. Indonesia dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif dan proaktif dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan pengelolaan sektor maritim secara holistik untuk menjawab dinamika yang terjadi, sekaligus memanfaatkan diplomasi ekonomi untuk menarik manfaat dari pergeseran ekonomi global dan mempromosikan tata kelola maritim yang berdasarkan hukum internasional.

B. Strategi Ekonomi Indonesia di Tengah Disrupsi Global

1. Karakteristik Ekonomi Global yang Disruptif

Ekonomi global kontemporer dicirikan oleh sejumlah fenomena disrupsi yang secara radikal mengubah cara produksi, konsumsi, dan distribusi nilai. Pertama, Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 adalah pendorong utama disrupsi ini. Otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan digitalisasi telah mengaburkan batas antara dunia fisik, digital, dan biologis. Hal ini memicu efisiensi yang luar biasa namun juga menimbulkan tantangan serius terkait masa depan pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, dan kesenjangan digital.

Kedua, fragmentasi rantai pasok global menjadi isu krusial. Perang dagang, ketegangan geopolitik, pandemi global, dan bencana alam telah mengungkap kerapuhan rantai pasok yang selama ini diasumsikan efisien. Tren reshoring (mengembalikan produksi ke negara asal) dan nearshoring (memindahkan produksi ke negara-negara terdekat secara geografis) mulai menguat sebagai upaya untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan pasok. Hal ini menciptakan peluang bagi negara-negara yang mampu menawarkan stabilitas dan efisiensi logistik.

Ketiga, isu perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau menjadi imperatif global. Tekanan untuk mengurangi emisi karbon, mengembangkan energi terbarukan, dan mengadopsi praktik ekonomi sirkular semakin masif. Negara-negara yang gagal beradaptasi dengan tren ini berisiko menghadapi hambatan perdagangan (misalnya, pajak karbon) dan kehilangan daya saing. Investasi dalam teknologi hijau dan pembangunan berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Keempat, globalisasi ekonomi secara umum telah mendorong perdagangan bebas lintas negara, yang memungkinkan barang, jasa, dan tenaga kerja bergerak tanpa hambatan berarti. Meskipun ini membuka peluang bagi produk dan jasa Indonesia untuk masuk ke pasar internasional, di sisi lain, ia juga menghadirkan ancaman persaingan ketat dengan produk, jasa, dan tenaga kerja asing di pasar domestik. Persaingan ini menuntut peningkatan kualitas dan efisiensi produk-produk domestik.

2. Potensi dan Tantangan Ekonomi Domestik Indonesia

Di tengah disrupsi global, Indonesia memiliki potensi besar sekaligus menghadapi tantangan domestik yang signifikan. Salah satu potensi terbesar adalah bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif sangat besar. Ini merupakan jendela kesempatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Namun, bonus demografi ini dapat berubah menjadi beban jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, serta inklusi pasar tenaga kerja.

Indonesia juga diberkahi dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, mulai dari nikel, bauksit, batu bara, hingga kelapa sawit. Optimalisasi SDA ini melalui hilirisasi industri menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun, tantangan dalam mengelola SDA meliputi keberlanjutan lingkungan, dampak sosial, dan kebutuhan investasi besar untuk industri pengolahan.

Aspek infrastruktur dan investasi juga krusial. Pembangunan infrastruktur yang masif dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, menjadikan Indonesia lebih menarik bagi investor. Namun, kesenjangan infrastruktur masih ada, terutama di luar Jawa. Menarik dan mempertahankan investasi asing langsung (FDI) serta investasi domestik memerlukan iklim usaha yang stabil, regulasi yang prediktif, dan birokrasi yang efisien.

3. Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan dan Ketahanan Ekonomi Indonesia

Untuk menghadapi disrupsi global dan mengoptimalkan potensi domestik, Indonesia perlu mengadopsi strategi ekonomi yang komprehensif dan adaptif.

1) Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif: Mendorong adopsi teknologi digital di seluruh sektor ekonomi, dari UMKM hingga korporasi besar, adalah esensial. Pengembangan ekosistem ekonomi digital, termasuk e-commerce, fintech, dan startup teknologi, akan menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru. Ekonomi kreatif juga perlu didorong sebagai salah satu sektor strategis karena kemampuannya menghasilkan nilai ekonomi tinggi dari inovasi dan kreativitas.
2) Hilirisasi Industri dan Peningkatan Nilai Tambah: Strategi hilirisasi SDA, seperti nikel menjadi baterai kendaraan listrik atau bauksit menjadi alumina, akan secara signifikan meningkatkan nilai ekspor dan menciptakan ekosistem industri yang lebih kuat. Ini membutuhkan investasi besar dalam teknologi, penelitian dan pengembangan (R&D), serta pengembangan SDM yang terampil.
3) Pengembangan Energi Terbarukan dan Ekonomi Sirkular: Transisi menuju energi terbarukan (surya, angin, panas bumi) bukan hanya memenuhi komitmen iklim, tetapi juga membuka peluang investasi baru dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang volatile harganya. Menerapkan prinsip ekonomi sirkular, yang berfokus pada pengurangan limbah, daur ulang, dan penggunaan kembali, akan meningkatkan efisiensi sumber daya dan menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan.

4) Penguatan UMKM dan Inklusi Keuangan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Pemberdayaan UMKM melalui akses permodalan, pelatihan digital, dan fasilitas pemasaran akan meningkatkan ketahanan ekonomi. Inklusi keuangan, termasuk penyediaan layanan perbankan dan digitalisasi pembayaran, akan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Pendidikan ekonomi kewarganegaraan dapat menjadi basis untuk mendorong kewirausahaan di masyarakat dan sekolah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia

5) Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Adaptif: Pemerintah dan bank sentral perlu merumuskan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap gejolak global. Kebijakan fiskal harus mendukung investasi produktif dan perlindungan sosial, sementara kebijakan moneter harus menjaga stabilitas harga dan nilai tukar Rupiah. Sinergi antara kedua kebijakan ini sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya, menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai bersifat inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah gelombang disrupsi global.

C. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Masa Depan Indonesia

Di tengah kompleksitas dinamika geopolitik dan disrupsi ekonomi global, peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi semakin vital dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi warga negara yang adaptif, kritis, dan berdaya. PKn bukan hanya sekadar mata pelajaran, melainkan sebuah instrumen strategis untuk membangun karakter dan kompetensi kewarganegaraan yang relevan di era modern.

1. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Kompleks

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan di era kompleks ini tidak dapat diabaikan. Lingkungan global yang dinamis menuntut setiap warga negara untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang melampaui batas-batas nasional. Pertama, PKn sangat esensial dalam membangun kesadaran geopolitik dan ekonomi di kalangan pemuda. Pemahaman tentang bagaimana kekuatan global berinteraksi, mengapa terjadi ketegangan di suatu wilayah, atau bagaimana disrupsi teknologi memengaruhi pasar kerja, adalah kunci bagi generasi muda untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor yang cerdas. Mereka perlu memahami implikasi dari kebijakan luar negeri, perjanjian perdagangan, atau inovasi teknologi terhadap kehidupan sehari-hari mereka dan masa depan bangsa.

Kedua, PKn berperan krusial dalam mengembangkan nalar kritis dan kemampuan analisis informasi di era banjir informasi dan hoaks, kemampuan untuk menyaring, mengevaluasi, dan menganalisis informasi secara kritis adalah keterampilan bertahan hidup. PKn harus membekali siswa dengan kemampuan untuk melihat berbagai perspektif, mengidentifikasi bias, dan membentuk opini yang rasional, bukan hanya menerima begitu saja informasi yang tersebar. Ini penting agar mereka tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang memecah belah atau ideologi ekstrem yang memanfaatkan ketidakpahaman.

Ketiga, PKn bertugas memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme yang adaptif. Nasionalisme di era global bukan berarti isolasi, melainkan kecintaan terhadap tanah air yang mendorong kontribusi positif bagi kemajuan bangsa di kancah internasional. Patriotisme adaptif berarti kesediaan untuk berinovasi dan bekerja sama dengan bangsa lain demi kepentingan bersama, tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai luhur bangsa. PKn harus menanamkan pemahaman bahwa kekuatan bangsa terletak pada persatuan dalam keberagaman dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Generasi muda sebagai "agent of change" atau agen perubahan perlu mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional yang bisa membawa perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan toleransi tinggi.

2. Tantangan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Saat Ini

Meskipun urgensinya besar, implementasi Pendidikan Kewarganegaraan saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, relevansi kurikulum dengan dinamika global seringkali menjadi sorotan. Kurikulum PKn yang terlalu teoretis atau kurang kontekstual dengan isu-isu kontemporer dapat membuat materi terasa jauh dari realitas siswa. Kesenjangan antara teori dan praktik, serta keterlambatan dalam memasukkan isu-isu terbaru seperti perubahan iklim, AI, dan kompleksitas geopolitik, dapat mengurangi minat dan pemahaman siswa.

Kedua, metode pembelajaran yang inovatif dan partisipatif masih perlu ditingkatkan. Pembelajaran yang berpusat pada guru dan minimnya diskusi atau proyek nyata yang melibatkan isu-isu kewarganegaraan dapat mengurangi efektivitas. PKn perlu beralih dari sekadar transfer pengetahuan menjadi pengembangan keterampilan berpikir, berdiskusi, dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sosial. Guru PKn juga menghadapi tantangan dalam memperbarui pengetahuan dan metodologi pengajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan abad ke-21.

Ketiga, peran guru dan lingkungan belajar sangat menentukan. Guru PKn harus menjadi fasilitator yang inspiratif, mampu menghubungkan materi pelajaran dengan isu-isu nyata, dan mendorong siswa untuk berani berpendapat. Lingkungan sekolah dan masyarakat juga harus mendukung praktik-praktik kewarganegaraan, seperti toleransi, musyawarah, dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Pembinaan warga negara yang bermakna adalah kunci, dan saat ini sedang menghadapi gelombang perubahan yang sangat cepat yaitu globalisasi. Pendidikan ekonomi kewarganegaraan juga dapat menjadi basis untuk mendorong kewirausahaan di masyarakat dan sekolah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Rekonstruksi dan Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan

Untuk memastikan PKn mampu membekali generasi muda menghadapi masa depan, diperlukan rekonstruksi dan penguatan yang sistematis. Pertama, integrasi

isu global (geopolitik, ekonomi hijau, AI, hak asasi manusia, keberlanjutan) secara lintas disiplin ke dalam kurikulum PKn menjadi keharusan. Materi harus diperbarui secara berkala agar relevan dan mencerminkan realitas dunia yang terus berubah. Pembelajaran harus mendorong siswa untuk memahami bagaimana isu-isu global berdampak pada kehidupan lokal dan nasional.

Kedua, pengembangan literasi digital dan media harus menjadi komponen integral PKn. Siswa perlu diajari cara mengenali disinformasi, memahami jejak digital, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab untuk partisipasi civic. Ini akan membekali mereka menjadi warga negara digital yang cerdas dan etis.

Ketiga, PKn harus memberikan penekanan pada kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Melalui proyek-proyek berbasis komunitas, simulasi diplomasi, atau debat isu publik, siswa dapat melatih keterampilan yang diperlukan untuk bekerja sama dalam tim, menyampaikan gagasan secara efektif, dan mencari solusi kreatif untuk tantangan kompleks. Mendorong partisipasi aktif siswa dalam isu publik, baik di tingkat lokal maupun nasional, akan memupuk rasa tanggung jawab dan keberanian mereka untuk berkontribusi. Dengan demikian, PKn tidak hanya mengajarkan teori, tetapi membentuk karakter warga negara yang berintegritas, berwawasan luas, dan siap menjadi pemimpin masa depan di tengah persimpangan geopolitik dan ekonomi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Masa depan Indonesia saat ini dihadapkan pada persimpangan yang krusial, dibentuk oleh dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang. Posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan besar di persimpangan dua samudra dan dua benua menempatkannya pada peran penting, namun juga rentan terhadap gejolak kekuatan global. Politik bebas aktif menjadi panduan utama dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di tengah persaingan antarnegara besar. Di sektor ekonomi, dengan hadirnya disrupsi teknologi dan perubahan rantai pasok global, Indonesia dituntut untuk menerapkan strategi adaptif, seperti transformasi digital, hilirisasi industri, serta pengembangan energi terbarukan, demi mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan vital dalam mempersiapkan generasi muda. PKn berfungsi sebagai sarana untuk membekali mereka dengan pemahaman geopolitik dan ekonomi yang komprehensif, kemampuan berpikir kritis, serta semangat nasionalisme yang relevan di era global. Oleh karena itu, penting sekali untuk merevitalisasi kurikulum dan metode pengajaran PKn agar lebih sesuai dengan isu-isu kontemporer, sehingga dapat melahirkan warga negara yang tidak hanya cerdas, tetapi juga adaptif dan berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, S. A., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. *Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Muda sebagai Agent of Change.* Jurnal Pendidikan Tambusai (2021).

Asyafiq, S. *Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial . (2019)

Haliza, V. N., & Dewi, D. A. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjawab Tantangan Masa Depan Bangsa Ditengah Arus Globalisasi*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (2020).

Majid, A. (2024). *Analisis Geopolitik Kebijakan Pertahanan Indonesia Dalam Visi Poros Maritim Dunia Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019*

Nashir, A. K. *Kepentingan dan Posisi Strategis Indonesia dalam Peta Geopolitik Indo-Pasifik.* Intermestic: Journal of International Studies (2024).

Nurhayati, D. (2017). *Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global Dibidang Ekonomi.*

Sugiharto, M. P, dkk. *Posisi Geopolitik Indonesia dalam Konteks Hubungan Regional Asia Tenggara*. TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (2025).